

PERANCANGAN APLIKASI PEMBUATAN BERKAS PERKARA PIDANA DAN PENGELOLAAN BERKAS PADA SISTEM INFORMASI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Cut Fiarni¹⁾, Evasaria Sipayung²⁾Yoana Martiana³⁾

¹Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Harapan Bangsa

Jalan Dipatiukur 80-84, Bandung 40132

Telp.: 022-250 6636, 022-250 6604 Fax.: 62-22-250 7901

cutfiarni@ithb.ac.id¹⁾evasaria@ithb.ac.id²⁾yoana@ithb.ac.id³⁾

Abstrak

Direktorat Reserse Kriminal Umum (DitReskrimUm) merupakan bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu tugas dari DitReskrimUm adalah melakukan penyidikan dan membuat berkas atas penyidikan tersebut yang disebut berkas perkara. Masalah yang terjadi adalah kesulitan pencarian softcopy berkas perkara karena tidak adanya standar untuk sistem pengarsipan berkas perkara pidana yang ada. Masalah lainnya adalah pembuatan surat masih secara manual bahkan menggunakan copy paste dari surat-surat sebelumnya sehingga sering terjadi kesalahan pengetikan isi surat. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sistem informasi pengarsipan dan pembuatan berkas perkara sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis DitReskrimUm. Sistem usulan dikembangkan dengan melakukan perancangan kebutuhan basis data yang diperlukan serta adanya layanan pembuatan surat-surat untuk kebutuhan penyidikan dan penyelidikan perkara dan berkas kelengkapan perkara secara otomatis. Dari hasil pengujian, sistem yang dikembangkan mampu mengatasi permasalahan pembuatan surat dan berkas perkara, sehingga proses bisnis pembuatan dan pengarsipan berkas perkara menjadi lebih efektif dan efisien. Disamping itu tersedia pula fitur dashboard sistem yang mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak pengambil keputusan.

Kata kunci: sistem informasi pengarsipan, berkas perkara pidana.basis data, dashboard.

Abstract

General Directorate of Criminal Investigation (DitReskrimUm) is part of the Indonesian National Police Task Force. One of the main tasks of DitReskrimUm is conducting an investigation and make the Recorded file on the investigation of the so-called dossier. The problem that occurs is the difficulty of finding softcopy docket because of the absence of standards for the filing system of criminal case files. Another problem is the making of criminal file is still conducted manually, even use the edited version from the previous files and letters. This course, typing errors and other error on similar technical things. The purpose of this research is to design and developing an information system archiving case files in accordance with the needs and business processes of DitReskrimUm. The proposed system was developed by the design requirements necessary data base as well as the service of making the letters to fulfil investigation needs and investigation proceedings automatically. From the test results, the developed system is able to overcome the problem of making the letter and the case file, so that the business processes of making and archiving of case files become more effective and efficient. Besides, there are also features a system dashboard that can provide the information required by the decision maker.

Kata kunci: sistem informasi pengarsipan, berkas perkara pidana.basis data, dashboard.

1. PENDAHULUAN

Sistem Berkas atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pengarsipan adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi atau struktur dari file yang digunakan dan cara pencarian record- record nya kembali [1]. Sistem pengarsipan memiliki peranan yang sangat penting karena memiliki banyak data yang harus diolah dan disimpan yang biasanya digunakan sebagai informasi untuk mendukung jalanya proses bisnis dalam instansi pemerintahan. Data tersebut harus disimpan dan dijaga dengan baik sesuai dengan UU No 7 tahun 1971 mengenai Ketentuan Pokok Kearsipan. Data juga harus digunakan dengan baik sebagai bahan bukti untuk suatu perusahaan atau instansi pemerintahan sesuai dengan UU No 8 tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan atau instansi pemerintahan [2].

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jabar ini merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang hukum, yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman kejahatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jabar memiliki data yang sangat banyak untuk disimpan dan diolah. Salah satu bagian yang memiliki data dan merupakan bagian yang penting dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum. Bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yakni kasus-kasus kriminal baik yang dilaporkan korban atau masyarakat maupun perbuatan pidana yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian yang diantaranya kasus pembunuhan, pencurian, penipuan dan kasus kriminal lainnya sesuai dengan KUHP atau Lex Specialis (UU Khusus). Namun saat ini data yang dimiliki dan digunakan di dalam instansi pemerintahan tersebut seringkali menghadapi kendala yakni, data masih tersimpan dengan sistem pengarsipan yang tidak terstruktur atau belum mempunyai format penulisan data yang benar atau dengan kata lain belum adanya sistem pengarsipan baku yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kehilangan dan kesulitan mencari data, sehingga apabila suatu saat data diperlukan maka pencarian data memerlukan waktu lama. Oleh karena itu dengan adanya sistem pengarsipan maka pengelompokkan data akan menjadi terstruktur dan pencarian data akan lebih mudah. Selain melakukan tugas penyidikan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum ini juga bertugas untuk membuat suatu berkas yang dinamakan Berkas Perkara sesuai dengan UU No.8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Berkas Perkara berfungsi sebagai administrasi penyidikan yang harus diserahkan kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Berkas Perkara tersebut isinya antara lain berupa data mengenai laporan kejahatan dari masyarakat atau korban, data tersangka dan korban, laporan polisi, surat panggilan, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, daftar barang bukti, daftar pencarian orang dan surat-surat lainnya.

Beberapa masalah sering terjadi di instansi pemerintahan ini yakni kesulitan mencari softcopy berkas perkara dan kehilangan berkas perkara yang disebabkan adanya pihak yang mengakses data diluar wewenangannya. Hal tersebut karena tempat penyimpana softcopy berkas perkara masih tersimpan dalam komputer yang digunakan bersama, dan belum adanya sistem pengarsipan yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan ini. Selain itu juga belum adanya standar sistem pengarsipan untuk penamaan softcopy berkas perkara. Hal ini menyebabkan penamaan softcopy berkas perkara yang tersimpan dalam komputer menjadi tidak teratur dan tidak konsisten. Sementara itu juga proses pembuatan berkas perkara yang baru juga belum efisien dari segi waktu. Hal ini karena sistem pembuatan berkas perkara yang baru belum mempunyai template format berkas perkara. Direktorat Reserse Kriminal Umum harus menggunakan file atau softcopy berkas perkara yang lama kemudian mengubah isi dari softcopy berkas perkara yang lama dengan isi laporan berkas perkara yang baru. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat dalam instansi pemerintahan tersebut. Solusi yang diusulkan itu yakni pembuatan prosedur pengarsipan yang baik menurut standar pengarsipan dan juga membuat suatu sistem aplikasi pembuatan Berkas Perkara Kriminal Umum untuk mendukung prosedur yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan semua data berkas perkara ini dapat terintegrasi dengan baik serta mempercepat proses pembuatan suatu berkas perkara pidana.

2. PERANCANGAN SISTEM USULAN

Pada bagian ini akan diulas mengenai analisis permasalahan dan kebutuhan sistem, skema algoritma serta perancangan dari sistem usulan yang akan dibangun.

2.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satu tugasnya adalah membuat suatu berkas yang dinamakan berkas perkara. Masalah yang terjadi adalah tidak adanya standar sistem pengarsipan sehingga penyidik seringkali kesulitan dalam pencarian softcopy berkas. Masalah kedua adalah pembuatan surat-surat dalam berkas perkara masih menggunakan cara copy paste dari berkas perkara lama. Dari hasil analisa masalah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 permasalahan pada bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum terkait kelengkapan berkas perkara, yaitu belum adanya standar yang mengakibatkan penamaan folder berkas perkara pidana tidak konsisten dan pencarian softcopy berkas perkara pidana pun menjadi sulit. Sementara masalah yang kedua adalah tidak adanya softcopy template surat-surat berkas perkara pidana sehingga petugas harus melakukan tindakan copy paste dari softcopy berkas perkara yang lama untuk diganti isinya dengan berkas perkara baru, serta sering terjadinya kesalahan pengetikan nama-nama tersangka atau korban. Hal ini mengakibatkan pembuatan berkas perkara pidana rentan kesalahan. Setelah melihat permasalahan yang ada, maka terdapat beberapa jenis kebutuhan yang diperlukan oleh bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum ini yaitu seperti yang terlihat pada tabel 1.

Table 1. Analisis Solusi dan Kebutuhan Sistem Usulan

No	Masalah	Solusi	Kebutuhan
1	Penamaan <i>softcopy</i> berkas perkara dalam <i>folder</i> tidak konsisten.	Penamaan berdasarkan standar system pengarsipan	Standar Pengarsipan <i>softcopy folder</i> berkas perkara yang baik dan konsisten serta Sistem Pengarsipan yang baik.
2	Setiap anggota tidak memiliki ketentuan penamaan <i>folder</i> yang sama	Seharusnya ada standar aturan penamaan <i>folder</i> berkas perkara.	
3	Pencarian <i>softcopy</i> berkas perkara memerlukan waktu lama	<i>File</i> berkas perkara disimpan dalam satu tempat khusus untuk menyimpan semua <i>softcopy</i> berkas perkara.	
4	Pembuatan surat-surat berkas perkara memerlukan waktu lama	Adanya <i>template</i> khusus yang digunakan untuk membuat surat-surat berkas.	<i>Softcopy template</i> surat-surat berkas perkara.

2.2 Skema dan Algoritma Sistem Usulan

Dari hasil penelitian dan analisis masalah serta jenis sistem pengarsipan yang ada, maka bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum ini memerlukan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini yaitu dengan adanya standar untuk penamaan folder dan file surat-surat berkas perkara pidana untuk memudahkan pencarian folder berkas perkara pidana serta *softcopy template* surat-surat berkas perkara pidana yang digunakan untuk memudahkan dan mempercepat pembuatan surat-surat berkas perkara pidana yang baru. Sistem usulan akan menangani permasalahan dalam sistem pengarsipan dan pembuatan *softcopy* surat-surat berkas perkara pidana yang baru dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyidik mendapatkan laporan mengenai kasus perkara pidana yang terjadi dari pelapor dan informasi yang dikumpulkan dari saksi-saksi dan tersangka yang terkait dengan kasus perkara pidana.
2. Data tersebut diproses dan dibuat dalam *template* surat-surat berkas perkara pidana sesuai dengan jenis surat-surat yang akan dibuat.
3. Setelah diproses data tersebut menjadi surat-surat berkas perkara pidana yang terkait dengan kasus perkara pidana.
4. Surat-surat berkas perkara pidana tersebut diproses dalam system pengarsipan.
 - a. Surat-surat tersebut dinamai dengan standar pengarsipan yang diusulkan agar mudah dicari.
 - b. Surat-surat tersebut juga disimpan dalam *folder* yang sudah sesuai dengan system pengarsipan yang diusulkan.
5. Setelah disimpan surat-surat berkas perkara pidana tersebut menjadi arsip yang digunakan penyidik untuk memenuhi administrasi Negara yaitu berkas perkara pidana.

Pada sistem usulan juga terdapat fungsi untuk membuat berkas baru yang terdapat dalam menu data berkas perkara. Fungsi ini digunakan sebagai tempat penyimpanan surat-surat yang akan dibuat dalam suatu berkas perkara. Sedangkan untuk *template* surat dibuat berdasarkan perbedaan isi surat sesuai dengan format standar pada masing-masing surat dengan detail input perkara yang bersifat dinamis. Pada gambar 1 ditunjukkan flowchart dari algoritma sistem usulan

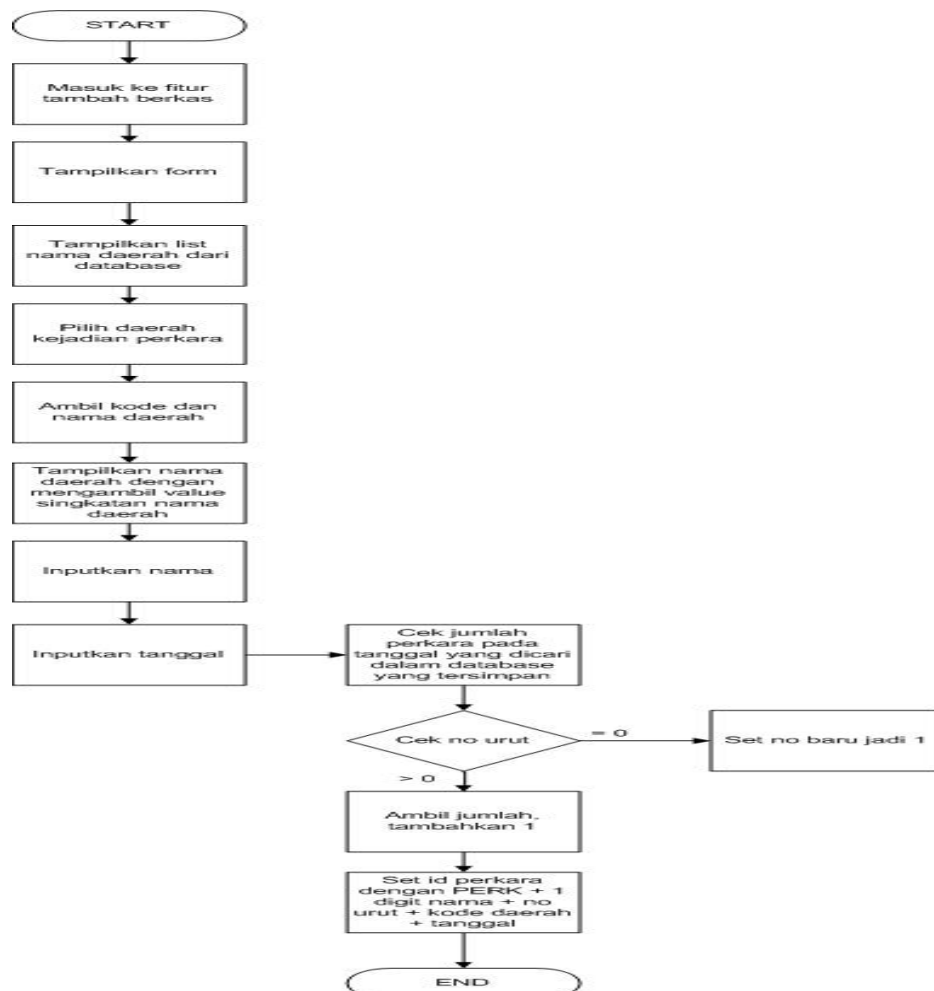
2.3 Perancangan Sistem Usulan

Tahap perancangan sistem merupakan tahap dimana terdapat rancangan dari sistem yang akan dibuat dan juga deskripsi sistem yang dibuat serta melihat penggunaan sistem secara terperinci. Tahap ini digunakan untuk memudahkan user atau dalam hal ini penyidik untuk melihat jalannya sistem secara keseluruhan. Sistem yang diusulkan ini dapat membantu penyidik untuk melakukan pencarian data apabila diperlukan dan membantu dalam pembuatan surat-surat yang terdapat dalam suatu berkas perkara pidana.

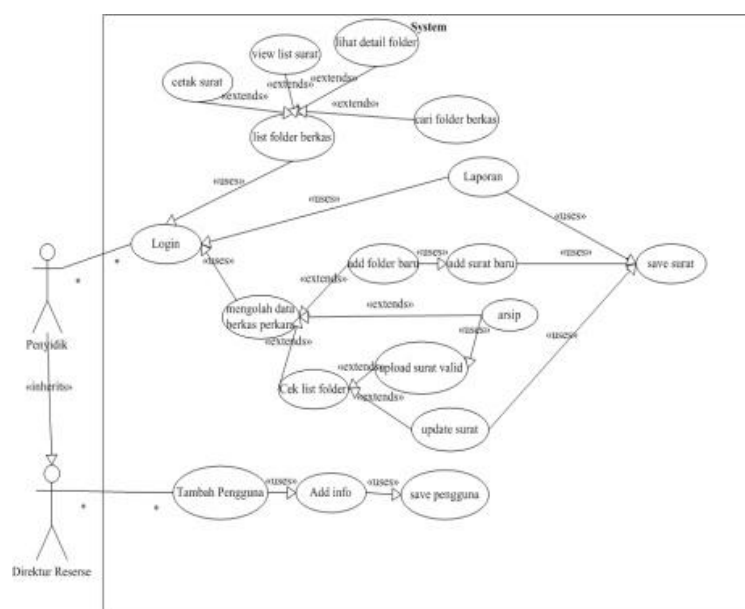
Use Case Diagram [3] pada gambar 2 menunjukkan mengenai fungsionalitas dari sistem dan interaksinya dengan user, yaitu penyidik dari bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sistem usulan akan membantu penyidik dalam proses pembuatan surat-surat berkas perkara pidana yang diperlukan dalam suatu proses pidana, selain itu juga dapat membantu untuk menyimpan atau mengarsipkan surat-surat yang ada folder sehingga mudah dicari apabila suatu saat surat-surat tersebut diperlukan. Pada sistem usulan, user dapat memilih antara dua *menu* yang terdapat dalam system sebagai berikut:

1. *Menu* arsip berkas perkara berisikan *folder* yang di dalamnya terdapat data dari surat-surat yang sudah *valid* yang dimasukkan oleh penyidik.

2. Menu data berkas perkara pidana, pada menu ini terdapat list *folder* surat-surat berkas perkara pidana. Surat tersebut bias surat *valid* atau surat yang belum *valid*. Di dalam *menu* data berkas perkara juga terdapat fitur untuk menambah *folder* dan surat baru jika terdapat berkas perkara pidana yang baru.



Gambar 1 Flowchart algoritma pembuatan berkas



Gambar 2 Use Case Diagram sistem usulan

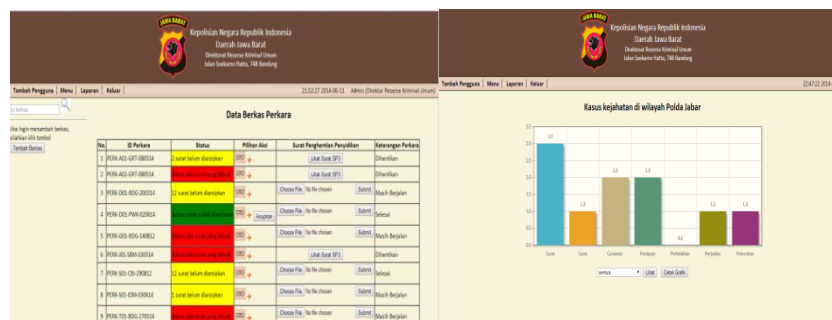
3. IMPLEMENTASI

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi terhadap sistem dengan menggunakan PHP pada pengembangannya. PHP dipilih karena dapat membuat tampilan yang menarik, penggunaan lebih mudah digunakan oleh *user*, dapat *men-support* berbagai jenis *database*, selain itu juga jika sistem ingin dikembangkan lebih mudah. [5]. Tahap ini juga akan memperlihatkan hasil dari rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya dan fungsi dari sistem yang dibuat.



Gambar 3 Tampilan Aplikasi
(a) Menu Utama (b) Contoh Salah Satu Template Surat

Gambar 3(a) merupakan tampilan awal sistem saat Direktur Reserse yang bertindak sebagai berhasil melakukan login. Terdapat 2 pilihan menu yaitu arsip berkas perkara dan data berkas perkara. Dalam arsip berkas perkara penyidik dapat melihat atau mencetak surat-surat valid yang terdapat dalam suatu berkas perkara pidana. Sedangkan dalam menu data berkas perkara, penyidik dapat melakukan update surat, menambah surat baru, melihat surat, ataupun meng-upload surat yang telah valid dan melihat status dari berkas perkara tersebut. Selain kedua menu sistem diatas penyidik juga dapat menambah user baru di tab tambah user apabila terdapat penyidik baru yang dirasa berhak mengakses sistem tersebut. Sesuai dengan kebutuhan operasional pada sistem usulan terdapat dua belas jenis surat yang dapat dibuat oleh penyidik untuk memenuhi suatu berkas perkara pidana. Surat-surat tersebut wajib terdapat dalam suatu berkas perkara pidana. Apabila keduabelas *template* surat belum dibuat semuanya maka suatu berkas perkara dianggap tidak selesai dan tidak dapat diarsipkan. Sebaliknya apabila penyidik sudah membuat 12 jenis surat yang wajib ada maka surat sudah dianggap selesai, tapi tetap tidak bias diarsipkan karena penyidik tetap harus meng-upload atau mentandatangani surat-surat yang sudah dibuat sebelumnya. Gambar 3(b) merupakan contoh dari salah satu template yang dibuat dari dua belas template surat yang dibuat untuk suatu berkas perkara pidana. Penamaan template untuk surat sudah diotomatiskan sesuai dengan penamaan surat yang diusulkan.



Gambar 4 Tampilan Report Aplikasi

(a) Menu Data BerkasPerkara (b) Tampilan grafik jenis kejahatan

Gambar 4(a) merupakan tampilan saat penyidik memilih *menu* data berkas perkara pidana. Dalam *menu* data berkas perkara penyidik dapat melihat *folder* yang telah dibuat, status dari *folder* berkas perkara tersebut, melihat *detail folder* yang terdapat dalam *menu* dan juga menambah surat untuk *folder* tersebut. Gambar 4(b) merupakan tampilan saat penyidik memilih tab dashboard. Dalam tab dashboard tersebut ditampilkan laporan penyidik dapat melihat kenaikan dan penurunan jumlah kejahatan menurut berkas perkara yang ada. Grafik tersebut dapat dilihat perbulan atau pun per tahun selama jenis kejahatan tersebut tersimpan dalam berkas perkara pidana yang tersimpan dalam database sistem.

Pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian terhadap fungsionalitas sistem dengan menggunakan berbagai *test-case* untuk menguji bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan. Setiap fitur yang ada dalam sistem akan dijelaskan dalam setiap tahapan di pengujian yang ditunjukkan pada table 2.

Table 2. Hali Pengujian Aplikasi Usulan

No	Case		Hasil Pengujian
1	Login	Cek NRP, Cek Password	V
2	Tambah User	Tambah User	V
3	Arsip Berkas Perkara	Cari folder berkas, Lihat surat, Cetak surat	V
4	Data Berkas Perkara	Cari folder berkas, Add berkas baru, Tambah surat, Lihat detail folder, Ubah surat, Lihat surat, Cetak surat, Upload surat, Arsipkan surat	V
5	Reporting	Surat berkas valid, Surat berkas belum valid, Grafik Kejahatan	V

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian dalam makalah ini salah satunya adalah untuk mengatasi masalah pengarsipan berkas perkara kriminal, maka dibuatlah standar pengarsipan yang akan diterapkan pada aplikasi sistem solusi. Standar tersebut digunakan untuk menyesuaikan penamaan folder berkas perkara pidana pada system usulan. Penamaan tersebut terdiri dari perkara, nama pelapor, nomor urut pembuatan surat, daerah, dan tanggal kejadian perkara (PERK + Abjad NamaPelapor + No Urut pembuatan surat + Daerah + Tanggal).
2. Untuk menyelesaikan masalah *copy paste* saat pembuatan surat dibuat *template* berbasis *web* dengan menggunakan *form.Template* surat ini dibuat untuk membedakan format isi surat yang standar dengan isi surat yang dinamis. *Template* dibuat berdasarkan jenis-jenis surat yang ada. Perbedaan untuk setiap jenis surat adalah penomoran surat, pasal, Undang-undang serta laporan polisi yang sesuai dengan perkara yang terjadi. Dengan adanya *template* ini maka pembuatan surat akan lebih mudah karena sudah tersedia *form* untuk mengisi surat dan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengetikan.
3. Sistem yang dibuat dapat menampilkan laporan berbentuk grafik. Grafik tersebut digunakan untuk melihat berapa banyak jenis kejahatan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Waktu dalam grafik dibedakan menjadi 3 macam yaitu pertahun, perbulan, atau semua tahun dan bulan. Selain itu juga grafik memuat status berkas perkara, status tersebut adalah perkara dihentikan, masih berjalan dan selesai. Semua data dalam grafik tersebut diambil dari berkas perkara yang tersimpan dalam *database* sistem yang dibuat.

Dari hasil pengujian, terhadap aplikasi sistem usulan, sistem yang dikembangkan mampu mengatasi permasalahan pembuatan surat dan berkas perkara, sehingga proses bisnis pembuatan dan pengarsipan berkas perkara menjadi lebih efektif dan efisien. Disamping itu tersedia pula fitur dashboard sistem yang mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak pengambil keputusan.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Handayani, Dewi.,2001. Sistem Berkas, Yogyakarta
- [2] Harmoni.,2012. Buku LUKS KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Jakarta
- [3] Sanjaya, Ridwan, S.E., S.Kom. (2005), Pengolahan Database MySQL 5 dengan Java 2 disertasi Teknik Pencetakan Laporan, Yogyakarta
- [4] Suhendar,A,S.Si.,Hariman,Gunadi,S.Si.,MT.(2002)*Visual Modeling Menggunakan UML dan Rational Rose*, Bandung
- [5] Sidik, Betha. (2012) *Pemrograman Web dengan PHP*, Bandung